

GERAKAN SOSIAL ISLAM:
Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi
Gerakan

Syarifuddin Jurdi

Pengajar Sosiologi Politik
Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar
Email: syarifjurdi@yahoo.com

Abstract;

Islamic social movement was a unique phenomenon during the 20th century. This movement was then transformed into certain orientation to purify Islamic values. The emergence of Islamic social movement in several countries was a response to internal and external condition of Muslims all over the world, with particular attention to colonialism and imperialism which were developed by Western countries against Islamic world. In general, Islamic social movement emerged in order to attract emancipation and transformation of Muslim communities and to rearrange socio-political and economical identity of Muslim communities in order to be in line with Islamic ethical values.

Kata Kunci: Gerakan sosial, Islam, pelembagaan gerakan, pembentukan blok gerakan dan tipologi gerakan.

Pendahuluan

Gerakan sosial Islam hadir untuk merespons berbagai kondisi sosial politik dan ekonomi yang dihadapi umat Islam. Kemunculan gerakan sosial Islam (disingkat GSI) merupakan manifestasi dari panggilan untuk terlibat secara aktif dalam proyek kemanusiaan untuk mentransformasi kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih berkualitas, lebih beradab dan merefleksikan nilai-nilai profetik Islam. Sejarah panjang gerakan sosial di berbagai belahan dunia, umum hadir untuk menyikapi keterpurukan umat Islam, misalnya kemunculan Ikhwanul Muslimin di Mesir merupakan respons atas runtuhnya khilafah Turki Usmani, kemunculan Hizbut Tahrir di Palestina juga dipandang sebagai respons terhadap ekspansi Zionis dan Barat yang begitu kuat ke jantung umat Islam, hal yang sama juga dialami oleh gerakan sosial di Pakistan, hadir untuk merespons peluang politik yang tersedia pasca berpisah dari India.

GSI juga muncul di belahan benua Asia dan Afrika dalam rangkaian transmisi ideologi revivalisme Islam, modernisasi Islam yang kemudian diikuti dengan menguatnya ideologi Wahabbisme dan Salafisme. GSI bertujuan untuk

mereformasi sistem sosial dan sistem politik agar sesuai dengan nilai-nilai etik Islam. GSI tersebut dibersinergi dengan meningkatnya jumlah kaum terpelajar di kalangan muslim, khususnya di negara-negara yang memiliki umat Islam mayoritas seperti halnya Indonesia.

Munculnya GSI awal abad ke-20 di Nusantara sebagai konsekuensi logis meningkatnya jumlah kaum terpelajar, munculnya Sarekat Dagang Islam (SDI) 1905 sebagai embrio GSI yang disusul dengan berdirinya Sarekat Islam tahun 1912 (SI dianggap sebagai kelanjutan dari SDI) dan Muhammadiyah 1912 merupakan respons atas kondisi internal umat Islam yang nyaris sempurna kolaps serta penetrasi pihak luar melalui kolonialisme dan imperialisme Barat. Untuk visi yang sama, lebih dari satu dekade kemudian, berdiri Persatuan Islam (Persis) pada 1923 di Bandung dan Nahdatul Ulama (NU) pada 1926 di Surabaya juga dideklarasikan. Kemunculan GSI dianggap sebagai kebangkitan kelompok sarungan yang mengadaptasikan konsep-konsep Islam yang bersifat eksklusif dengan pemikiran modern yang bersifat rasional dan fungsional.

Melalui kemunculan GSI tersebut dapat dipahami bahwa gerakan sosial mengalami eskalasi dalam situasi politik yang tidak stabil (terjadi distorsi identitas, krisis sosial, krisis politik) termasuk di dalamnya berkembangnya konflik dalam suatu negara sebagai akibat dari pemberontakan dan gerakan teror yang hadir dalam situasi politik yang berubah. Kekuatan eksternal suatu negara juga ikut menentukan arah gerakan terbentuk, baik faktor ideologi, jaringan sumber dana ataupun kontribusi pihak luar terhadap kekacauan dalam suatu negara seperti pada kasus krisis Indonesia 1998, krisis di Mesir tahun 2010 dan 2013, krisis di berbagai wilayah lainnya memungkinkan munculnya gerakan sosial yang memanfaatkan peluang politik yang tersedia untuk mengorganisir diri dan proses pembentukan ulang identitas politik. Di Indonesia pasca 1998 misalnya, muncul sejumlah GSI yang memanfaatkan peluang politik yang dibuka oleh kapitalisme Barat.

Peta Gerakan Sosial Islam

GSI merupakan rangkaian pemanfaatan peluang kesempatan politik dalam rangka merestorasi sistem sosial, politik, budaya dan pembentukan ulang identitas umat Islam. GSI dapat dimasukkan dalam kelompok masyarakat yang tersingkir, kemudian melakukan pengorganisasian diri untuk menyatakan eksistensinya. Suatu aksi sosial kolektif dalam bentuk gerakan dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi aktor GSI untuk mencari identitas

dan pengakuan melalui aksi ekspresif, melalui tuntutan universalistik. Tuntutan ini dengan melibatkan banyak aktor gerakan secara langsung dalam aksi ekspresif. Konstruksi solidaritas melalui sejumlah media dan arena yang tersedia (baik gerakan sosial maupun kekuatan politik) mendukung agenda dan isu gerakan, inilah arena mobilisasi sumber daya dapat digalakkan. Dengan cara ini, aktor gerakan dapat menjadi mediator bagi tuntutan mereka, apa yang oleh Melucci sebutkan sebagai proses negosiasi tuntutan mereka dan karakter partisipasinya jadi terwakilkan, representasional.¹

Selain itu, GSI juga muncul atas dasar kalkulasi dan asumsi rasional mengenai peta politik global, kebijakan ekonomi politik negara-negara maju terhadap dunia Islam yang tidak adil, diskriminasi serta kolonialisme dan imperialisme dalam berbagai bentuknya, termasuk imperialisme akademik-intelektual menjadi penyebab utama bangkitnya GSI di sejumlah negara. Gerakan yang berhaluan politik seringkali hadir sebagai reaksi atas penindasan terhadap umat Islam yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan asing yang disertai dengan penindasan identitas sosialnya.

Secara universal, GSI merupakan rangkaian protes sosial atas perasaan teringkari umat Islam terhadap eksistensi hidup mereka serta teka teki bagaimana perasaan itu diartikulasikan dalam kehidupan sosial politik menjadi pilihan bebas yang sebagian dimanifestasi dengan mengorganisir diri untuk melakukan transformasi sosial dan emansipasi masyarakat.

Dengan menggunakan perspektif teori gerakan sosial kontemporer, kemunculan GSI sebagai bentuk pendekatan jalan tengah antara realitas sosial umat Islam dengan harapan-harapan ideal mengenai bentuk masyarakat yang dikehendaki. Kemunculan GSI di berbagai negara dapat dipandang dalam pendekatan struktural dengan fokus pada negara dan keterlibatan pihak asing yang membangkitkan tindakan kolektif dan pilihan-pilihan rasional yang dipandang efektif untuk mempertahankan identitas sosialnya.

Kemunculan Ikhwanul Muslim di Mesir pada tahun 1928, Gerakan Jihad Islam di Palestina tahun 1960, Hizbut Tahrir di Palestina tahun 1952, Jamati Islami Pakistan tahun 1941, Masyumi di Indonesia tahun 1945, PAS Malaysia tahun 1951, FIS (Barisan Penyelamat Islam) Aljazair 1989, Harakat a-Muqawima al-Islamiyyah (HAMAS) Palestina 1988, Hizbulloh di Lebanon 1982, Partai Rafah di Turki 1981, dan berbagai gerakan sosial Islam lainnya di sejumlah

¹ Lihat Rajendra Singh, "Teori-teori Sosial Baru", dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformasi Insist*, Edisi 11, Tahun III 2002, hal. 26.

negara secara umum merupakan manifestasi dari perubahan sosial dan struktur peluang politik yang berimplikasi pada perubahan struktur politik internasional. Struktur peluang politik bisa diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dari dunia internasional. Sebagai contoh sederhana yang menegaskan masalah ini adalah tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan sosial Islam Indonesia pasca Orde Baru yang memanfaatkan struktur peluang politik dibuka dan diinisiasi oleh kaum kapitalis, meski dalam kenyataannya, kaum islamis mempersoalkan kapitalisme dan varian-varianya.²

Eskalasi GSI, selain struktur peluang politik, juga didukung oleh struktur mobilisasi yang dipergunakan, selain mobilisasi sumber daya, mobilisasi media gerakan, dan mobilisasi jaringan efektif mendorong eskalasi gerakan. Melalui jaringan ini, gerakan akan mengalami peningkatan kapasitas dan kemampuan untuk menggerakkan gerakannya. Mobilisasi tidak berlangsung tanpa disertai dengan penguatan identitas gerakan dan akar sosial yang menjadi dasar kemunculan dan perkembangan GSI.

Dalam konteks kemunculan Ikhwanul Muslimin di Mesir misalnya, variabel eksternal dan kondisi umat Islam menjadi akar sosial kemunculannya, runtuhnya khilafah Islam di Turki (Turki Usmani) dianggap sebagai salah satu faktor pendorong pelebagaan gerakan dengan memobilisasi sumber daya secara efektif. Secara umum Ikhwan merupakan organisasi GSI modern yang dipimpin oleh kaum terpelajar sebagaimana halnya dengan kemunculan HAMAS di Palestina yang secara umum merupakan fenomena perkotaan, bahkan gerakan ini dipimpin oleh kader-kader yang berpendidikan Barat dengan keterlibatan ulama yang sedikit.³

Lanskap GSI menunjukkan adanya korelasi antara meningkatnya jumlah intelektual muslim terpelajar dengan kebangkitan gerakan sosial di dunia Islam. Revivalisme Islam merupakan suatu keniscaya dalam struktur GSI, bahkan secara spesifik Oliver Roy menyebut latar belakang pendidikan para aktor gerakan revivalisme Islam, utamanya mereka yang mendorong berkembangnya ideologi islamisme umumnya berasal dari ilmu-ilmu eksakta

² Lihat misalnya Quintan Wiktorowics (ed.), *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach* (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2004), terjemahan *Gerakan Sosial Islam* (Yogyakarta: Daging Publishing dan Yayasan Wakaf Paramadina, 2012); Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad, Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University, 2006), terjemahan *Laskar Jihad* (Jakarta: LP3ES, 2008)

³ Lihat Glenn E. Robinson, "Hamis sebagai Gerakan Sosial", dalam Quintan Wiktorowics (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 221-265

(sarjana teknik).⁴ Apa yang dimaksud oleh Roy mengenai latar belakang para aktor GSI dapat dipersoalkan, mengingat ditemukan juga sarjana sosial yang terlibat dalam organisasi pergerakan revivalisme Islam seperti pada kasus *National Islamic Front (NIF)* di Sudan yang dipimpin oleh Dr. Hassan Abdullah at-Turabi, lulusan Sorbone University.

Visi besar GSI berkisar pada dua domain utama yakni islamisasi negara dan islamisasi masyarakat. Ide mengenai *islamic state* atau *khilafah islamiyah* merupakan pilihan gerakan pada beberapa kasus di sejumlah negara seperti kasus FIS Aljazair yang menentang keras Barat atau pada kasus *Welfare Party* (Partai Kesejahteraan) yang dipimpin oleh Prof. Necmetin Erbakan di Turki yang kini bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Turki yang merupakan partai berkuasa. Secara umum, GSI mengembangkan gagasan mengenai islamisasi pasif ketika berhadapan dengan kooptasi politik dan kooptasi modal sembari membangun hubungan yang mesra dengan rezim dengan target-target politik jangka panjang.

Pola hubungan yang bersifat simbiosis mutualism yang dikembangkan oleh sejumlah GSI di berbagai negara memiliki agenda pentahapan gerakan yakni melakukan islamisasi masyarakat melalui pendidikan dan pembentukan komunitas-komunitas religius yang dikondisikan menjadi komunitas yang taat terhadap prinsip-prinsip hidup islami. Untuk beberapa kasus, strategi gerakan semacam itu, juga pernah dipergunakan oleh GSI yang eksis di Nusantara seperti yang dilakukan Muhammadiyah pada akhir 1920-an dan awal 1930-an dengan menerima subsidi pemerintah atas sekolah-sekolah yang dikelolanya.⁵

Perspektif tentang GSI

Gerakan sosial atau GSI merupakan obyek kajian dan studi ilmu-ilmu sosial yang aktual dan menarik dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam konteks global maupun konteks nasional dan lokal. Muncul dan berkembangnya GSI-GSI baru dengan corak yang beragam menunjukkan bahwa topik ini dapat dikaji dengan menggunakan perspektif yang lintas disiplin keilmuan. GSI sebagai suatu obyek kajian tidak hanya dapat dianalisis melalui studi sosial semata, tetapi juga melalui pendekatan politik, sejarah, bahkan dengan menggunakan perspektif ekonomi politik. Dalam beberapa hal,

⁴ Lihat Oliever Roy, *The Failure of Political Islam*, terjemahan *Gagalnya Islam Politik* (Jakarta: Serambi, 1996), hlm. 64

⁵ Lihat Syarifuddin Jurdi (ed. al.), *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Sosial Kemanusiaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), khususnya bab dua.

kebangkitan GSI baru di berbagai belahan dunia dan khususnya di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dukungan ekonomi politik negara-negara Timur Tengah yang dipandang sebagai penganut ideologi Wahabi.

Beberapa kerangka pemikiran untuk membaca dan memahami GSI dapat digunakan, diantaranya; *pertama*, perspektif revivalisme, salafisme dan islamisme. Aktor GSI pada mulanya menfokuskan perhatian pada pemurnian agama (purifikasi) berkembang menjadi sebuah ideologi untuk merespons perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya kolonialisme, modernisme dan sekularisme yang mengukuhkan hegemoni Barat atas dunia Islam. Upaya penciptaan kembali masyarakat salaf (generasi Nabi) dan aksi sosial yang menghendaki adanya perubahan mendasar terhadap sistem yang dihasilkan dari interaksi dengan modernitas, telah mendorong sejumlah GSI untuk memperjuangkan sistem Islam (*nizam islami*), atau dalam bahasan aktivis gerakan, Islam sebagai alternatif dan Islam adalah solusi mengatasi persoalan kemanusiaan.

Perspektif ini mengonfirmasi bahwa islamisme atau revivalisme Islam berada pada dua kubu untuk merestorasi masyarakat yakni kubu revolusioner yang menghendaki islamisasi masyarakat mutlak melalui institusi negara dan kubu reformis yang menekankan tindakan sosial dan politis bertujuan melakukan reislamisasi masyarakat dari bawah ke-atas, yang dengan sendirinya akan mewujudkan negara Islam.⁶ Startegi yang ditempuh bisa melakukan penghancuran, oposisi, kolaborasi dan ketidakpedulian, untuk menggambarkan hal ini menurut Roy, Ikhwanul Muslimin di Yordania ikut serta dalam pemilihan parlemen. Jamaat-i Islami Pakistan dan Ikhwanul Muslimin di Sudan mendukung kudeta militer. Jihad Islam di Mesir melancarkan kampanye pembunuhan atas tokoh-tokoh pemerintah. Ini merupakan fakta bahwa kubu islamis memiliki cara yang bervariasi untuk mencapai tujuannya.

Revivalisme menurut Dekmejian menggambarkan tingginya kesadaran Islam di kalangan umat Islam, bentuk Islam yang merakyat ditunjukkan dengan menyebarnya masyarakat yang dipenuhi kebajikan dan persaudaraan dan ketaatan yang mencolok untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Dalam aktivisme keagamaan selalu melibatkan kelompok Islam militan. Kelompok militan memiliki kesadaran politik tinggi, bermusuhan dengan negara sekular dan aparat pemerintah. Antara gerakan revivalis Islam dengan kelompok

⁶ Oliever Roy, *Op. Cit.*, hlm. 29

militan memiliki hubungan simbiosis mutualisme dimana kelompok militan akan mudah melakukan rekrutmen anggota-anggota baru, dan mudah pula bersembunyi di balik gerakan kebangkitan Islam ketika berkonfrontasi dengan penguasa. Tidak heran kalau dikatakan bahwa gerakan revivalis Islam dianggap sebagai suatu rangkaian kesatuan yang dinamis antara spiritualisme pasif-apolitis dengan militansi dan radikalisme.⁷

GSI dengan corak ideologi revivalisme menurut Oliever Roy disebut *Islamism* dan *neo-fundamentalis*, Roy menyebut bahwa *Islamism* merupakan paham keagamaan Islam kontemporer yang memandang bahwa Islam adalah ideologi politik (*Islamism as a political ideology*) lebih dari sekedar agama sebagaimana pandangan yang berkembang di dalam masyarakat Barat⁸ Sedangkan John L Esposito menyebutnya dengan upaya kembali kepada kepercayaan fundamental Islam, dalam seluruh aktivitasnya, kaum revivalis-fundamentalis mendasarkan segala aktivitasnya pada pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah secara literal. Gerakan revivalis Islam menurut Esposito tidak identik dengan ekstremisme, fanatisme, aktivisme politik, terorisme dan anti-Amerika. Karena itu Esposito lebih memilih menggunakan *Islamic revivalism* atau aktivisme Islam, untuk menggambarkan gerakan kebangkitan Islam kontemporer, karena terma ini dianggap memiliki akar tradisi Islam.⁹

Dalam perspektif tersebut, apa yang berkembang di Mesir dan Turki, proses demokrasi di dua negara itu menunjukkan bahwa pengaruh kubu islamisme di masyarakat sangat kuat, kemenangan kubu Ikhwanul Muslimin di Mesir tahun 2011 dan keberhasilan PKP di Turki mengonfirmasi bahwa islamisme diterima baik, meski mereka belum melahirkan Pan-Islamisme. Kemenangan kedua pergerakan tersebut sebagai manifestasi dari kerinduan rakyat pada kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Al-Qur'an, Sunnah dan syariat Islam.

Kedua, perspektifkultural politik. Gerakan sosial keagamaan, pada umumnya menggunakan strategi kultural untuk menghilangkan kesan adanya keterkaitannya dengan politik praktis. Kendati usaha menghilangkan kesan ini sebagian berhasil, tapi suatu tindakan sosial dengan menggunakan strategi kultural pada prinsipnya tidak steril dari motif-motif politik. Tindakan keagamaan yang bertujuan menyadarkan, mencerahkan dan memberdayakan

⁷ Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam Keagamaan dan Kesatuan*, terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 3

⁸ Oliver Roy, *The Failure of Political Islam* (London: I.B. Turis Publishers, 1994), hlm. ix

⁹ John L. Esposito, *The Islamic Threat Myth or Reality* (Oxford: Oxford University Press, 1992), hlm.7-8

rakyat tidak dapat dipandang bebas dari pengaruh dan motif politik. Ketika Islam tampil dalam format kultural misalnya dalam konteks politik Indonesia era Orde Baru pada dekade 1980-an, bukanlah fenomena yang tak membuah hasil, seperti dikatakan oleh Donald K Emmerson bahwa kebangkitan Islam kultural di tengah kekalahan Islam politik merupakan hasil kooptasi antara Islam dengan pemerintah. Usaha saling mengkooptasi itu, hendaknya jangan sebagai hasil pergumulan antara pihak yang menang dan kalah, sebagai suatu proses penyesuaian-penyesuaian terbatas di antara mereka sendiri... Islam kultural berkembang sangat baik dan menakjubkan.¹⁰

GSI pada umumnya menggunakan strategi kultural sebagai pilihan gerakannya, tanpa bermaksud mengosongkan sama sekali ruang kesadaran umat dari politik. kesadaran politik tetap ada dan dikembangkan, hanya saja ia tidak terpusat dalam bentuk politik praktis yang bersifat temporer, jangka pendek, dan secara sempit mengembangkan politik partisan. Karena itu, dalam Islam kultural, *power politics* bukanlah satu-satunya alternatif bagi perjuangan Islam. Terdapat berbagai peluang dan sarana bagi keberhasilan perjuangan umat Islam; antara lain melalui bidang dakwah, pendidikan, sosial-ekonomi, budaya, dan sebagainya. Sebenarnya yang disebut dengan Islam kultural itu sendiri pada dasarnya, bukanlah sebuah konsep yang a-politis.¹¹

Berbagai GSI pada level global yang telah diuraikan dalam konteks global menguatkan kesan bahwa GSI bukanlah suatu gerakan yang a-politik, bahkan motif-motif politik dan ideologis GSI jauh lebih menonjol, hanya dalam Islam kultural, dimensi dan muatan politisnya tidaklah diartikulasikan dengan "siapa mendapat apa" (*who gets what*) dan proses perjuangan meraih kekuasaan.¹² Istilah Islam kultural semakna dengan - meminjam istilah David Easton "politik alokatif" (*allocative politics*) yakni alokasi otoritatif nilai-nilai tertentu dalam suatu masyarakat untuk kepentingan masyarakat tersebut secara keseluruhan.¹³ Politik alokatif diartikulasikan dengan cara

¹⁰ Donald K Emmerson, *Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politics* (Ithaca: New York: Cornell University Press, 1976), hlm. Karel A. Strenbrik, "Toward a Pancasila Society: The Indonesian Debate on Secularization, Liberation and Development 1969-1989", dalam *Exchange*, No. 54 Desember 1989; bandingkan dengan Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, hlm. 135-136.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 137

¹² *Ibid.*

¹³ David Easton, "An Approach to the Analyses of Political System", dalam *World Politics*, IX (1957), hlm. 383-400. Politik alokatif dimaknai sebagai proses memperjuangkan nilai-nilai Islam ke dalam proses politik berdasarkan konstitusi yang telah menjadi konsensus bersama. Politik alokatif dilakukan Muhammadiyah secara lebih serius sejak Muktamar 1971 di Ujung pandang (Makassar), lihat juga Din Syamsuddin, "Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde Baru", dalam Din Syamsuddin (ed.), *Muhammadiyah Kini dan Esok* (Jakarta: Panjimas, 1990), catatan kaki hlm. 168-206

mensubstansialisasikan nilai-nilai dan etik keislaman secara inklusif. Islam kultural bersifat penetratif dan inklusif, dan tidak terbatas semata-mata dalam pergumulan di bidang politik maupun kekuasaan, tetapi memberikan makna Islam kepada medan budaya dalam arti luas.¹⁴ Politik alokatif yang dijalankan Muhammadiyah misalnya merupakan bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu usaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran dan meninggalkan kemunkaran.¹⁵

Ketiga, perspektif strukturasi dan agensi. Perspektif ini digunakan sebagai dasar analisis dalam menjelaskan dan memahami eskalasi dan de-eskalasi GSI. Pendekatan strukturasi akan memotret praktik-praktik sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu. Athony Giddens menyebutkan bahwa aktivitas-aktivitas sosial tidak dihadirkan oleh para aktor, melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor, melalui aktivitasnya, para agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas.¹⁶

GSI memanfaatkan struktur kesempatan politik yang tersedia dengan strategi proliferasi dan ekspansi ke struktur-struktur sosial yang lebih spesifik melalui aktor-aktor gerakannya, setiap aktivitas aktor GSI dan jejaringnya bukanlah pragmatisme politik semata, tetapi suatu bentuk agensi manusia yang melakukan tindakan-tindakan dengan maksud-maksud tertentu, artinya siapapun yang melakukan suatu tindakan—termasuk tindakan politik GSI haruslah bermaksud melakukan tindakan itu, jika tidak maka perilaku itu hanyalah sekedar respons reaktif semata.¹⁷

Keempat, perspektif integrasi. Perspektif ini biasa digunakan dalam menganalisa hubungan Islam dan politik (kekuasaan). Eksistensi GSI tidak dapat diukur dengan otonom yang bersifat kaku-rigid, tetapi kesediaan untuk mengakomodasi dan berintegrasi dengan struktur politik kekuasaan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk terus-menerus melanjutkan proses reformasi Islam, merekonsiliasi komitmen Muslim dengan kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat,¹⁸ melalui keterlibatan “agen-agen intelektual” dalam struktur negara. Proses rekonsiliasi komitmen ini bukanlah sekedar akibat dari rekayasa politik, akan tetapi sebagai kelanjutan dari modernisasi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 188

¹⁶ Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (USA: University of California Press, 1984),

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler*, terj. (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 39

pendidikan Islam yang secara representatif dijalankan oleh GSI termasuk Muhammadiyah dan NU.¹⁹ Dalam kaitan ini, transformasi sosial dari masyarakat Islam akan berkaitan secara langsung dengan watak negara dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dimensi transformasi yang dapat dilakukan dalam konteks ini yakni melalui perubahan institusi-institusi resmi maupun perubahan pada tingkat masyarakat.²⁰ Dalam pemahaman umum bahwa dimensi struktural dan kultural saling berkaitan dan mendukung dalam proses transformasi khususnya perubahan pada level struktur politik kenegaraan.

Secara praktis, GSI dapat mentransmisikan SDM ke struktur kekuasaan atau melakukan santrinisasi priyayi sebagaimana pola umum yang dipergunakan oleh aktor GSI pada dekade 1980-an dalam konteks politik yang otoriter. Sebagai contoh, pimpinan beberapa ormas Islam, khususnya Muhammadiyah terkesan menjadi subordinasi negara, sebagian besar elite-elite Muhammadiyah di daerah-daerah merupakan pengurus Golkar dan PNS yang mengabdikan pada kepentingan rezim politik. Pola semacam ini dapat dimaknai sebagai strategi integrasi, dengan catatan aktor-aktor yang masuk Golkar dan PNS harus mewarnai kebijakan politik agar lebih islami, lebih manusiawi dan beradab, tetapi kalau sebaliknya, yang terjadi adalah kooptasi dan hegemoni, kesan terakhir inilah yang dominan dalam politik Orde Baru. Pendekatan integratif bertujuan untuk mentransformasikan sisi profetik Islam dalam proses politik. Pendekatan ini sebagai konsekuensi logis dari proses penarikan diri sejumlah gerakan Islam dari aktivitas politik praktis dengan kembali menekankan pada kerja dakwah yang berorientasi kultural dan pemberdayaan.

Dalam struktur pemikiran GSI Indonesia dikenal dengan istilah *high politics* dan *allocative politics*, dua konsep ini memiliki makna bahwa GSI memiliki agenda politik yang terbingkai, melalui konsep ini, GSI berusaha mencari jalan masuk untuk meng-"Islam"-kan negara. Usaha tersebut diperjuangkan dengan melakukan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam negara, bentuk integrasi dapat dilakukan; *pertama*, integrasi substansial: a) integrasi yang bersifat asimilasi, terutama dalam bidang akidah dan akhlak, dalam bidang fikih siyasah, dan dalam bidang mahkamah dan pelapisan sosial; b)

¹⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sipres, 1994), hlm. 12

²⁰ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Op. Cit.*, hlm. 40

integrasi yang bersifat penyesuaian, yaitu dalam fikih jinayah dan dalam fikih mu'amalah. *Kedua*, integrasi struktural.²¹ Untuk melakukan integrasi, tidak lagi menekankan upaya-upaya dalam politik partisan dengan parlemen sebagai arena perjuangan utama.²²

Corak integrasi itu menurut Nicholson terjadi dalam tiga bentuk, *pertama*, ada secara bersama-sama, terutama Islam dan undang-undang adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat; *kedua*, pergantian ("replacement") yaitu kebiasaan Islam menggantikan adat; dan *ketiga*, penyesuaian, yaitu melakukan perubahan kedua-duanya sehingga suatu tingkah laku baru.²³ Corak integrasi ini menguatkan kesan bahwa kalangan Islam telah masuk dalam "perangkap" kooptasi negara, model perjuangan ini memunculkan anggapan santrinisasi birokrasi atau istilah "Islamisasi birokrasi" merupakan indikasi dari keberhasilan pendekatan "integratif" sulit dibantah,²⁴ artinya memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan dari dalam struktur negara sendiri.

Genealogi Gerakan Sosial Islam Indonesia

Akar ideologis GSI selalu merujuk pada paham Wahabisme yang merupakan istilah yang memiliki makna bahwa itu berasal dari pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Muhammad ibn 'Abd Wahhab (1703-1792) yang menentang segala bentuk praktek keagamaan yang tidak bersumber pada Al-Qur'an Sunnah. Takhayul, bid'ah dan k[c]hurafat (TCB) yang sangat terkenal itu sebagai bentuk tingkah laku yang tidak Islami. John O. Voll mendefinisikan Wahabisme sebagai "prototipe fundamentalisme yang kaku dalam pengalaman Islam moder", karena gerakan ini mengambil sikap yang keras dalam mendefinisikan siapa yang bisa dianggap beriman, dengan mensyaratkan bahwa tidak boleh ada penyimpangan terhadap syari'ah, dan membedasakn secara ketat antara dunia orang beriman dan mereka yang tidak beriman.²⁵ Wahabisme merupakan ideologi gerakan yang menolak perbuatan yang tidak didasarkan pada pengetahuan, karena itu *taqlid* harus ditolak dan segera kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

²¹ Andi Rasdianah, *Integrasi Sistem Penggaderreng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa*, Dis. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 220-354

²² Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm., 334

²³ Clara Nicholson, *The Introduction of Islam into Sumatra and Java: a Study in Cultural Change*, Disertasi Ph.D. (Syracuse University, 1965), hlm, 153-157, di kutipan dalam, *Ibid.*, hlm. 33-34

²⁴ Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Islam Politik* (Jogjakarta: Galang Press, 2001), hlm., 53

²⁵ Dikutip dalam Noorhaidi Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 33

Visi purifikasi atau pemurnian Islam yang menjadi simbol GSI, termasuk GSI di Indonesia bersifat mendasar dalam struktur sosial masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Ketika praktek keagamaan dipenuhi dengan hal-hal yang berbau mitos dan TBC, GSI hadir untuk memurnikan kembali praktek keagamaan yang tercemar dengan tradisi, adat dan warisan budaya yang bertentangan dengan nilai otentik Islam. Dalam kasus Indonesia, ketika Muhammadiyah muncul dengan gagasan pemurnian ajaran Islam yang ditunjukkan dengan memperbaiki arah kiblat di masjid Gede Kauman serta menyelenggarakan pendidikan dengan sistem klasikal, maka tuduhan sebagai warga bahwa kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang telah mereka amalkan secara turun-temurun.

Kemunculan GSI di Indonesia ditandai oleh dua kondisi yang saling berinteraksi yakni masalah-masalah sosial keagamaan umat Islam Indonesia dan kondisi sosial politik kebangsaan. Kita bisa memetakan kemunculan GSI pra kemerdekaan, ketika Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan NU muncul, GSI ini menghadapi dua "musuh" utama yakni kebijakan politik pemerintah yang diskriminatif serta kondisi sosial ekonomi dan keagamaan umat Islam yang nyaris sempurna mengalami keterpurukan. Ketika Muhammadiyah lahir pada 1912, praktek keberagamaan umat Islam tidak murni lagi, banyak hal yang telah bertaburnya mistisisme dalam ritual keagamaan, akal tidak berdaya menghadapi tradisi yang penuh dengan kestatisan dan kepasifan, pemikiran umat Islam terbelenggu oleh otoritas *mazhab* dan *taqlid* kepada ulama sehingga ijtihad tidak berfungsi untuk mendorong transformasi sosial

GSI melakukan framing gerakan dengan menekankan pada penguatan identitas keagamaan dan orientasi pada hal-hal yang bersifat teologis, kendatipun dalam perkembangannya strategi tersebut dipandang berhasil membangun basis dasar kesadaran sosial jamaahnya, tetapi untuk beberapa kasus GSI seringkali gagal beradaptasi dengan struktur politik negara. Muhammadiyah, NU, DDII dan beberapa GSI lainnya mempergunakan framing gerakan dengan orientasi pada pembinaan dan pencerahan jamaahnya, tetapi pada periode politik tertentu sulit memainkan peran yang maksimal. Muhammadiyah selama Demokrasi Terpimpin yang otoriter, NU pada periode Orde Baru yang otoriter, DDII selama kedua rezim tersebut yakni Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Untuk beberapa GSI lainnya, pada periode Orde Baru berhasil melakukan framing gerakan seperti Hizbut Tahrir Indonesia

(HTI, Gerakan Tarbiyah yang melahirkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yayasan Fathul Muin yang melahirkan Wahdah Islamiyah dan berbagai gerakan Islam lainnya.

Proses pemingkakan gerakan sebagai target untuk melakukan ekspansi pada upaya pembentukan karakter jamaah dengan mendorong mereka melakukan amal saleh atau orientasi spiritual menjadi ciri umum GSI, baik GSI yang lahir pra kemerdekaan maupun GSI yang tumbuh dan berkembang belakangan ini. Pembentukan GSI pada prinsipnya merupakan pembentukan blok politik kalangan islamis dengan melakukan ekspansi ke jantung masyarakat, target utamanya adalah merespons kolonialisme, imperialisme, modernisme dan rezim otoriter.

Blok Politik GSI dan Pembentukan Gerakan

Pada masa lalu, kemunculan GSI atau dapat disebut sebagai blok politik, setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam tiga *melting pot* yakni Yogyakarta dan sekitarnya, Bandung-Jakarta dan Surabaya. Pembentukan Muhammadiyah dan Sarekat Islam merupakan GSI yang lahir dari struktur masyarakat Jawa (Yogyakarta) dengan orientasi gerakannya pada pemurnian agama, modernisasi, pemberdayaan serta transformasi sosial masyarakat. Pembentukan Persatuan Islam sebagai satu blok GSI modernis lahir di Bandung Jawa Barat yang juga memiliki visi sosial keagamaan yang sama yakni berorientasi pada visi modernis Islam. Terakhir pembentukan NU di Surabaya oleh sebagian kalangan menyebutnya sebagai blok tradisional dan menjadi satu kekuatan GSI yang mengalami kemajuan dalam struktur pergerakannya.

Dari tiga wilayah kemunculan GSI tersebut, blok Yogyakarta dan Surabaya merupakan blok yang sukses melakukan ekspansi dan terus bertahan hingga kini, meski Persis tetap eksis, tetapi pengaruhnya belum seluas Muhammadiyah dan NU. Dalam perkembangannya, blok-blok baru dalam pembentukan GSI bermunculan, tidak lagi berpusat di Jawa, di berbagai daerah juga muncul. Blok-blok lama dalam pembentukan GSI relatif berhasil menghadirkan wajah Islam moderat, toleran dan akomodatif sehingga memastikan bahwa proses politik yang demokratis dapat terbingkai dalam pemikiran keagamaan yang moderat diwakili oleh blok Yogyakarta dan blok Surabaya serta struktur-struktur pergerakan sosial lainnya yang tumbuh dewasa ini.

Pasca Orde Baru, Jakarta merupakan satu blok politik penting yang melahirkan GSI yang berorientasi radikal seperti halnya Front Pembela Islam (FPI) serta pembentukan pergerakan politik Islam yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Malang Jawa Timur juga melahirkan suatu pergerakan pada 1998 dengan lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Yogyakarta setidaknya melahirkan dua blok baru kekuatan revivalis Islam yakni Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Komunitas Salafi yang kemudian melahirkan Laskar Jihad (LJ) pimpinan Jafar Umar Thalib, suatu gerakan radikal Islam yang secara terbuka menyatakan ikut berperang melawan musuh-musuh Islam di Ambon ketika konflik Ambon yang melibatkan umat Islam dan Kristen.

Proses framing gerakan yang berlangsung panjang antara periode kooptasi dan hegemoni negara terhadap gerakan sosial hingga jatuhnya Orde Baru membuka ruang bagi berkembangnya berbagai halaqah yang sudah muncul di berbagai kampus, komunitas dan daerah bermetamorfosis menjadi suatu gerakan. Kemunculan GSI pasca Orde Baru merupakan dinamika panjang interaksi antara Islam politik dalam merespons otoritarian negara dan reaksi-reaksi jangka pendek terhadap proses perubahan. Kemunculan GSI menurut Noorhaidi Hasan terkadang dikaitkan dengan manuver elite militer dan sipil yang ingin mempertahankan *status quo* dengan cara memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam putaran negosiasi politik yang tanpa akhir.²⁶

Interaksi aktor-aktor gerakan dengan jaringan transnasional memberi kredit bagi proses pembentukan blok baru pergerakan. Kemunculan Komunitas Salafi yang merupakan jaringan Yogyakarta tumbuh dan berkembang di sejumlah daerah, termasuk komunitas Salafi yang bersifat otonom tanpa terkait dengan komunitas Salafi lainnya, oleh sebagian pengamat hal ini dianggap sebagai koneskuensi logis dari kampanye global Saudi Arabia yang sangat ambisius mendorong Wahabisasi umat Islam. Arab Saudi dengan keuntungan dari penjualan minyak yang meningkat pada dekade 1970-an dan 1980-an berhasil memberikan dukungan dana ke sejumlah aktor dan GSI yang berkembang di Indonesia, baik yang secara terbuka maupun yang bergerak untuk membangun kesadaran teologis umat.

Melalui jaringan transnasional, sejumlah GSI berdiri embrionya pada dekade 1980-an seperti berdirinya Wahdah Islamiyah di Makassar yang

²⁶ Noorhaidi Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 322

sebelumnya bernama Yayasan Fathul Muin dan Hidayatullah Banjarmasin, kedua pergerakan ini merupakan hasil interaksi Islam politik Indonesia dengan rezim otoriter yang memberlakukan azas tunggal serta pembentukan jaringan gerakan dengan kekuatan-kekuatan transnasional. Ketika GSI terbentuk, jaringan dana dan ideologi gerakan dengan ideologi revivalisme Islam terus dipelihara dan dikuatkan.

Blok-blok baru pembentukan GSI terus bermunculan di sejumlah daerah dengan fokus pembinaan jamaah. Rekrutmen kader GSI yang berorientasi radikal jauh lebih intensif daripada yang dilakukan oleh gerakan-gerakan moderat. Untuk memahami proses pembentukan blok gerakan ini, John Lofland²⁷ memperkenalkan enam aspek penting guna memahami aspek penting bangunan gerakan; *pertama*, aspek kepercayaan. Aspek ini mengandung makna sebagai hal-hal yang dianggap benar, dimana anggapan tersebut dipergunakan sebagai penggerak untuk menentang realitas, termasuk didalamnya doktrin, ideologi, pandangan hidup, harapan, kerangka berfikir dan wawasan. Substansi kepercayaan gerakan sosial lebih banyak berbicara tentang lokasi sosial (*social location*) dimana kepercayaan itu hidup, daripada substansi atau karakter gerakan karena aliran utama (*maenstream*) selalu berada dalam konteks sosial tertentu. Konstruksi sosial seperti demokrasi, kapitalisme, kebebasan individu, hak-hak asasi manusia yang dianggap benar oleh negara Barat dianggap sebagai penyimpangan atau kesalahan.

Kedua, organisasi gerakan sosial. Upaya pelembagaan gerakan sosial merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan. Adanya organisasi sebagai cara untuk menggerakkan orang-orang yang mempunyai kepercayaan sama, agar mau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi gerakan sosial akan ditentukan oleh jenis kelembagaan yang dibentuk dan tujuan yang hendak dicapai. Keanggotaan organisasi juga memiliki kriteria-kriteria tertentu, hanya mereka yang mnyetujui visi-misi gerakan itu yang dapat menjadi anggota gerakan sosial. Selain itu, organisasi gerakan sosial memerlukan pemimpin gerakan dan aspek pendanaan atau sumber keuangan yang dapat menopang kegiatan-kegiatan gerakan dalam mencapai tujuan.

Ketiga, sebab-sebab timbulnya gerakan sosial. Sebagian besar dari gerakan sosial yang tumbuh dan berkembang pesat lahir dari tradisi, budaya dan mempunyai sistem kepercayaan dan doktrin, setidaknya terdapat ideologi

²⁷ John Lofland, *Social Movement Organizations* (New York: Guide to Research on Insurgent Realities, Aldien de Gruyter, 1996); bandingkan dengan Ngadisah, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua* (Yogyakarta: Raja, 2003), hlm. 171-242

yang dipegang teguh oleh para aktor gerakan yang kemudian mendorong mereka untuk bergerak. Tetapi juga harus disadari bahwa terdapat juga gerakan sosial dan GSI yang tumbuh dengan motif ekonomi dan tidak mempunyai doktrin yang jelas dan umumnya gerakan sosial semacam ini mudah terpengaruh dan tidak memiliki pendirian yang jelas, akibatnya gerakan mereka lebih ditentukan oleh perhitungan-perhitungan ekonomi dan keuntungan-keuntungan apa yang dapat dinikmati dari aktivitas pergerakannya.

Keempat, keikutsertaan. Setiap GSI memerlukan adanya keikutsertaan dalam gerakan. Ketika banyak orang yang merasa tidak puas dan kecewa atas perlakuan tidak adil, distorsi aqidah, ketimpangan sosial dan ekonomi, kebijakan yang diskriminasi, mereka berusaha mencari upaya yang bermakna agar kondisi dan keadaan yang mereka hadapi dapat diubah yang dimanifestasikan dalam bentuk gerakan, baik individual maupun kolektif. Untuk tindakan yang bersifat kolektif, terdapat tindakan yang lepas kontrol (spontan) dan ada pula yang terorganisir dengan membentuk wadah. Dalam pengorganisasian yang terakhir inilah banyak orang yang direkrut menjadi anggota dan pengikut.

Kelima, strategi. Setiap gerakan sosial mempunyai sasaran gerakan yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Strategi terkait dengan bagaimana tujuan akan dicapai dan sarana apa yang digunakan untuk mencapainya.

Keenam, efek (pengaruh) gerakan. GSI yang membuat agenda gerakan yang jelas, tentu akan berhasil merekrut anggota yang banyak dan efek dari pengorganisasian itu adalah terjadi perubahan dan cara pandangan pihak-pihak yang dianggap kompeten untuk merespons tuntutan aktor-aktornya. Setiap gerakan sosial memberikan efek yang signifikan bagi anggota-anggota gerakan dan apabila agenda yang diperjuangkan menyangkut kepentingan umum warga, maka pengikutnya semakin banyak dan efek yang dihasilkan juga akan lebih besar dirasakan oleh warga.

Tipologi Artikulasi Gerakan Sosial Islam Indonesia

Ideologi atau sumber keyakinan pada Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara langsung berpengaruh pada proses menafsirkan teks-teks Islam itu secara seragam. Keragaman penafsiran teks-teks Islam dalam konstruksi GSI melahirkan berbagai model artikulasi gerakan yang secara umum dapat

dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tipologi artikulasi GSI akan termanifestasi dalam berbagai kegiatan atau cara merespons suatu kondisi sosial politik dan keagamaan bangsa. Secara sosiologis dan historis, tipologi artikulasi GSI di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam lima tipologi artikulasi, tipologi yang didasarkan kondisi obyektif masyarakat Indonesia.

Dalam pengelompokan ini, tulisan ini mengikuti pola yang dilakukan oleh Syafii Anwar yang membagi tipologi artikulasi Islam politik Indonesia.²⁸ Pengelompokan ini bersifat longgar dan terbuka untuk dipersoalkan, diperbaiki (dikurangi atau ditambahkan) sesuai dengan fenomena GSI di Indonesia.

- 1) Tipologi artikulasi GSI *fundamentalis-radikal*.²⁹ Kelompok GSI kategori ini berada pada absolutisme pemikiran yang mendasarkan diri pada teks klasik Islam, karena penekanan pada teks semacam itu mempunyai implikasi langsung terhadap tindakan sosial politiknya, karena orientasi keberagamaannya sangat mengutamakan skripturalisme absolut, sikap mereka umumnya sangat ekstrem (termasuk dalam kelompok ini mereka yang melakukan tindakan teror). Tindakan-tindakan dari kelompok ini selain mengedepankan simbol-simbol keagamaan tetapi juga sering bersifat "anarkhis". Fenomena dari artikulasi kelompok ini tergambar, ketika radikalisme massa di Jawa Timur yang menggunakan simbol "jihad" berani mati demi seseorang, atau juga dengan begitu tampak dari artikulasi terhadap sweeping "buku-buku yang dianggap kiri di Yogyakarta 2001", kelompok ini berlindung di balik Tap MPRS 1966. Umumnya kelompok ini menghendaki penampilan yang secara simbolik seperti keharusan memakai celana yang memperlihatkan mata kaki bagi lelaki. Model artikulasi kelompok ini biasanya diwakili oleh semacam "gerakan salafiyah" dan Laskar Jihad dengan tokoh utamanya Ja'far Umar Thalib (mantan Panglima Laskar Jihad Ahlussunnah Waljama'ah), FPI pimpinan Habib Rizkie Shihab, Laskar Jundullah, FPIS Solo, dan berbagai kelompok teror yang membangun jaringan di berbagai daerah dengan mengusung ideologi radikal. Radikalisasi massa yang terjadi tahun 2001 seperti kasus di Jawa Timur dan Yogyakarta lebih berorientasi pada persoalan politik, dan bukan sebagai proses menuju kebangkitan umat dalam konteks

²⁸ Lihat Syafii Anwar, 1995, "Negara, Masyarakat dan Artikulasi Politik Islam Orde Baru", Dalam Nasrullah Ali-Fauzi, *ICMI Antara Status Quo Dan Demokratisasi*, (Bandung: Mizan, 1995).

²⁹ Tadi telah disinggung pula tentang kelompok ini, tapi penjelasan berikut ini melihat kecenderungan orientasi gerakannya dan bukan pada level pemikiran dan tafsir atas doktrin seperti telah dijelaskan.

peradaban global. Menurut Horace M Kalle, radikalisme adalah merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Penolakan terhadap masalah yang terjadi bisa berwujud dalam bentuk ide, nilai atau lembaga-lembaga yang dapat dipandang sebagai yang bertanggungjawab terhadap kondisi yang ditolak tersebut. Seruan jihad pendukung Presiden Abdurrahman Wahid (Gus-Dur) pada tahun 2001 bisa dimaknai sebagai respons atau reaksi terhadap kelompok-kelompok yang ingin menja-tuhkan Presiden. Radikalisme pendukung Gus-Dur adalah reaksi konkret untuk merubah arus politik yang menggoyang Gus-Dur. Resolusi jihad tentu saja merupakan alat legitimasi bagi para pendukung Gus-Dur untuk melakukan perlawanan dengan dalih agama.

- 2) Tipologi artikulasi GSI *formalis-simbolik*.³⁰ Kelompok Islam ini menghendaki penampilan idiom-idiom atau simbol-simbol Islam secara formal dalam kehidupan publik atau politik, seperti istilah negara Islam, khilafah Islamiyah, dan kelmebagaan negara yang islami. Bentuk konkret dari model artikulasi kelompok ini, tergambar dengan jelas pada saat sidang tahunan MPR tahun 2000 dan 2002, dimana GSI seperti MMI, Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus (HAMMAS), DDII, hingga terbentuknya Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan dengan visi utamanya penerapan syariat Islam di wilayah publik. Kekuatan GSI yang berorientasi legal-formal lebih banyak motif politiknya daripada upaya sadar dan serius membangun kesadaran keagamaan umat Islam. Hal penting yang harus dicatat dari model artikulasi ini adalah sekalipun mereka berjuang itu gagal, tetap menempuh jalur-jalur konstitusional dan tidak dalam bentuk kekerasan dan anarkhis.
- 3) Tipologi artikulasi GSI *rasional-inklusif*. Kelompok ini lebih menekankan pada pemahaman ajaran Islam secara terbuka. Dengan keterbukaan itu Islam akan mampu menjadi "*Rahmat bagi seluruh alam*". Sebagaimana diidealkan dalam kitab suci, bahwa Nabi Muhammad itu mendapat gelar "*al-amin*" yaitu orang yang dipercaya, baik oleh kaumnya maupun oleh umat yang bukan Islam. Bagi kelompok ini kemenangan Islam adalah

³⁰ Mengenai kelompok ini, pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan, tapi orientasi pembahasan pada bagian ini lebih kepada level praktisnya.

"*kemenangan ide*", bukan kemenangan pribadi atau kelompok tertentu atau kemenangan politis, artinya Islam harus menjadi agama yang dapat dimengerti oleh semua umat manusia, karena Islam adalah risalah terakhir yang menjadi tuntunan bagi umat manusia. Mereka yang terwakili dalam kelompok ini memberi peluang dan apresiasi terhadap pluralisme agama-agama, dan Islam diharapkan dapat didefinisikan secara inklusivistik, tidak harus terpaku secara rigid dan literalis sesuai yang tertuang dalam kitab suci, tetapi harus mampu diterjemahkan pada kehidupan kemanusiaan secara konkrit. Sehingga dengan demikian simbol-simbol Islam harus terbuka dan dimengerti oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim. Representasi dari kelompok ini dapatlah disebut adalah komunitas Paramadina Mulya (Nurcholis Madjid), Maarif Institute (Syafii Maarif), Wahid Institute (Abdurrahman Wahid), LSAF (Dawam Rahrdjo) dan kelompok Islam inklusif lainnya.

- 4) Tipologi artikulasi GSI *emansipatoris-transformatif*. Kelompok ini lebih menekankan pada misi Islam yang paling utama adalah kemanusiaan dan pemberdayaan. Oleh karenanya Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus-menerus dan mentransformasikan masyarakat dengan berbagai aspeknya yang bersifat normatif dan etis. Perhatian utama kelompok ini bukanlah pada permasalahan teologi, politik, tetapi lebih berorientasi pada masalah sosial, ekonomi, pengembangan masyarakat, penyadaran hak-hak politik rakyat. Maka diperlukan pendekatan yang mampu "menghidupkan kembali semangat profetis Islam" untuk mewujudkan peranan GSI dalam proses perubahan masyarakat secara lebih mendasar, dengan pendekatan historis-struktural serta kultural, berorientasi kerakyatan dan menggunakan metode yang "praktis". Kelompok ini lebih banyak berjuang dan bekerja diluar institusi negara dan mereka berada dalam memperkuat *civil society*, sebagai entitas yang tidak harus menjadi lawan atau musuh bagi negara melainkan saling memberi dukungan untuk membuka peluang bagi transformasi dan pemberdayaan. Representasi GSI jenis dapat dilihat dari Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Dompot Dhuafa, Lazis dan berbagai organisasi pemberdayaan masyarakat.
- 5) Tipologi artikulasi GSI *liberal*. Model artikulasi kelompok ini melihat Islam sebagai komponen dan pengisi kehidupan bermasyarakat, dan oleh karenanya harus diarahkan sebagai faktor yang komplementer, dan bukan

sebagai faktor yang disintegratif terhadap negara atau komunitas lain. Islam bagi kelompok ini tidak terkait langsung dengan kekuasaan politik dan urusan yang sungguh-sungguh bersifat negara, karena dalam Islam tidak terdapat sistem politik yang berdasarkan agama, tetapi agama berperan mengatur kehidupan umat manusia, Nabi Muhammad juga tidak mendirikan negara Islam, malah justru mendirikan negara kota Madinah yang pluralistik dengan keragaman suku, agama dan keyakinan masyarakat yang berada di wilayahnya. Jadi dapat dijelaskan, bahwa potret negara Madinah yang dibangun oleh Nabi bukan negara Islam, karena itu tidak ada contoh langsung dari Nabi yang mengatur tentang negara Islam. Kelompok ini dapat dianggap sebagai kebalikan dari kelompok yang pertama dan kedua dan bahkan dalam beberapa hal kelompok ini “memusuhi” agenda-agenda politik rekan mereka yang termasuk dalam kelompok pertama dan kedua. Representasi kelompok ini dapat diwakili misalnya oleh JIL, JIMM, organisasi feminis-jender “liberal” yang tumbuh dalam tradisi Islam dll.

Selain pada tingkat gerakan juga terdapat kategori respons lain yang barangkali perlu dijelaskan sebagai bahan untuk mengetahui keragaman bentuk respons pada level wacana umat Islam terhadap proses perubahan iklim politik yang memungkinkan munculnya gagasan alternatif untuk menjawab berbagai persoalan umat di masa depan. Respons tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut ;

- 1) Kelompok Islam tradisional yang memiliki kesamaan dengan model tipologi pertama dan kedua diatas yaitu penekanan pada tradisi Islam klasik. Tetapi kelompok ini membiarkan praktek keagamaan bercampur dengan tradisi masyarakat yang tidak ada anjuran dalam al-Qur'an serta contohnya dari Nabi atau biasa disebut sebagai kelompok Islam yang “bid'ah”.³¹ Memang Islam tidak bertentangan dengan budaya lokal masyarakat, tetapi tidak semua budaya lokal sesuai dengan ajaran Islam, karena diketahui sebagian budaya yang berkembang di Indonesia saat ini merupakan warisan budaya Hindu-Budha dan animisme-dinamisme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kesadaran mengenai masalah sosial tersebut, melahirkan GSI revivalis yang melakukan dekontsruksi

³¹ Bid'ah artinya mengada-adakan praktek ibadah yang tidak terdapat perintah dalam Al-Qur'an maupun contoh dari Nabi, melainkan berdasarkan tradisi yang diwarisi oleh para leluhur mereka di masa lalu, sehingga mereka mencampur-adukan antara yang disebut haq dan yang bathil

tata kehidupan sosial secara menyeluruh, masih dalam bingkai tradisi Islam.

- 2) Kelompok Islam modernis yang mencoba memahami ajaran Islam secara aktual, rasional dan mengadopsi sebagian model pendidikan modern sebagaimana yang dipraktekkan di Barat,³² kelompok ini menekankan kembali kepada Islam yang otentik, Islam yang murni yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. Umumnya pendukung kelompok ini merupakan kaum terpelajar dan komunitas perkotaan.
- 3) Kelompok Islam puritan³³ yang menekankan pada ekspresi estetik atau keindahan Islam, keindahan dalam Islam merupakan satu term sentral. Peristilahan ini sebagai upaya untuk keluar dari tradisi dogmatis Islam yang selama ini diajarkan atau bisa disebut sebagai post-dogmatik yang menekankan pada teks klasik Islam.
- 4) Kelompok Islam kiri atau kiri Islam yang mencoba memahami Islam dari sisi sosialisme dan marxisme atau marxisme ditafsir kedalam makna Islam. Islam kiri lebih menekankan pada telaah kritik terhadap sistem sosial, hermeneutika teks, dan tafsir sosial kontemporer dalam optik neomarxian, yang pada intinya menurut Hasan Hanafi, bagaimana Islam menjadi kekuatan pembebas dan revolusioner.³⁴

Pengelompokan bentuk tipologi artikulasi dan respons pada tingkat wacana dan gerakan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas merupakan implikasi langsung dari pergeseran politik bangsa. Era reformasi merupakan tempat untuk mengekspresikan berbagai pemikiran dan gerakan yang barangkali telah muncul dari “bawa tanah” semasa Orde Baru, tetapi baru dapat dengan leluasan muncul kearena publik secara bebas ketika kejatuhan Orde Baru.

³² Kelompok ini berusaha memadukan antara pendidikan agama (Islam) dengan pendidikan umum atau (barat) dan terbuka terhadap hal-hal baru. Sebagai kebalikan dari kelompok tradisional yang justru menekankan pada kitab-kitab kuning, kitab gundul dan sebagainya, serta menolak system pendidikan barat. Tetapi kedua kelompok ini telah mengalami perubahan dan bahkan sudah sulit untuk membedakan mana yang dapat disebut sebagai representasi dari yang tradisional dan mana yang modernis. Pendukung utama dari kelompok modernis antara lain Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Fajlurrahman dan beberapa pemikir modern Islam Indonesia

³³ Gagasan Islam puritan ini diungkapkan oleh Munir Mulkhani. Munir menganggap Islam perlu melakukan “rujuk” dengan budaya lokal tanpa harus keluar dari makna Islam yang otentik. Kutipan diambil dari majalah *Tradem.*,

³⁴ Baca pandangan Hasan Hanafi dalam Kazou Shimogaki, *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Posmodernisme Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*, terj. (Yogyakarta: LkiS, 2004).

Pengelompokan diatas bukan merupakan pemetaan Islam, Islam hanya ada satu tetapi respons, gerakan, dan berbagai bentuk pemikiran sangat beragam, karena itu tidak ada istilah Islam telah terkotak-kotak, melainkan respons yang merupakan hasil interpretasi terhadap teks Islam yang dipahaminya yang melahirkan perbedaan. Bahwa teks Islam terbuka untuk ditafsir sesuai konteks peraubahan sosial politik itulah yang berbeda. Tetapi artikulasi GSI pada level politik merupakan upaya simbolik untuk “mengawal” proses perubahan politik nasional menuju kepada sebuah sistem politik yang mencerminkan “keridhaan” Tuhan, bahwa yang daulat menurut kelompok Islam formalis-simbolik adalah Tuhan dan bukan rakyat, karena itu demokrasi pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Islam, meskipun demokrasi dalam pemahaman rakyat saat ini menekankan pada kedaulatan rakyat.

Penutup

Eskalasi dan de-eskalasi GSI sangat ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik suatu bangsa. Pada negara yang menerapkan sistem demokrasi liberal, GSI memperoleh ruang artikulasi yang jauh lebih baik bila dibandingkan negara-negara yang menganut sistem otoriter. Namun demikian, GSI yang berhasil membangun hubungan simbiosis mutualisme dengan rezim otoriter juga sebenarnya dapat berkembang dengan baik melalui jaringan-jaringan birokrasi negara dan dukungan politik dari pemerintah.

Beberapa kasus GSI kontemporer yang sukses hadir sebagai satu kekuatan baru dalam politik global menunjukkan bahwa islamisme bukanlah sesuatu yang ditakuti oleh masyarakat, bahkan masyarakat merindukan kehidupan yang religius-islam, bila dibandingkan dengan praktek hidup sekuler, kapitalis, materialisme dan konsumerisme. Pada kasus Turki dengan Mesir misalnya, islamisme yang dipersoalkan oleh banyak pihak yang mendukung sistem demokrasi, justru khawatir dengan sepaik terjang kaum islamis, termasuk sekutu mereka dari luar, khususnya negara-negara Barat, terbukti kaum islamis yang dipandang menentang demokrasi justru mendukung dan mempergunakan sistem demokrasi untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan prinsi-prinsip kemanusiaan yang terdapat Islam. Kasus partai Islamis di Turki dan Mesir yang oleh sebagian kalangan terkait dengan GSI Ikhwanul Muslimin menunjukkan fakta bahwa demokrasi telah mereka manfaatkan untuk memperoleh legitimasi rakyat. Di Indonesia,

PKS bisa menjadi contoh kaum islamis yang berpolitik, pada kasus Jawa Barat dan Sumatera Utara, PKS memperoleh dukungan yang signifikan.

GSI akan terus mengalami metamorfosis ke depan dengan menegosiasikan prinsip-prinsip ideologisnya dengan watak masyarakat yang berubah. Negosiasi tersebut bukan sesuatu yang tidak mustahil akan menghadirkan suatu kolaborasi politik yang dapat mengayomi kepentingan masyarakat luas, tanpa memperdebatkan asal usul ideologinya. GSI di Indonesia secara umum mengambil haluan kultural dan tidak mengaitkan diri secara langsung dengan politik praktis. Karena itu, eksistensi GSI di Indonesia akan sangat menentukan arah demokrasi bangsa.

Wallahu a'lam bi shawab

Daftar Pustaka

- Anwar, Syafii, 1995, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- _____, 1995, "Negara, Masyarakat dan Artikulasi Politik Islam Orde Baru", Dalam Nasrullah Ali-Fauzi, *ICMI Antara Status Quo Dan Demokratisasi*, Bandung: Mizan.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, 2007, *Islam dan Negara Sekuler*, terj. Bandung: Mizan.
- Effendi, Bahtiar, 1998, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina
- _____, 2001, *Teologi Baru Islam Politik*, Jogjakarta: Galang Press
- Emmerson, Donald K, 1976, *Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politics*, Ithaca: New York: Cornell University Press
- Esposito, John L., 1992, *The Islamic Threat Myth or Reality*, Oxford: Oxford University Press
- Giddens, Anthony, 1984, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, USA: University of California Press.
- Hasan, Noorhaidi, 2006, *Laskar Jihad, Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University.
- terjemahan *Laskar Jihad*, Jakarta: LP3ES, 2008
- Hunter, Shireen T., 2001, *Politik Kebangkitan Islam Keagamaan dan Kesatuan*, terj. Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Jurdi, Syarifuddin (ed. al.), 2010, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Sosial Kemanusiaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____, 2002, "Teori-teori Sosial Baru", dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformasi Insist*, Edisi 11, Tahun III

- Lofland, John, 1996, *Social Movement Organizations*, New York: Guide to Research on Insurgent Realities, Aldien de Gruyter, 1996
- Mulkhan, Abdul Munir, 1994, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta: Sipres
- Ngadisah, 2003, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, Yogyakarta: Raja
- Rasdiyanah, Andi, 1995, *Integrasi Sistem Penggaderreng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa*, Dis. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Robinson, Glenn E., 2012, " Hamas sebagai Gerakan Sosial", dalam Quintan Wiktorowics (ed.), *Op Gerakan Sosial Islam*, Yogyakarta: Daging Publishing dan Yayasan Wakaf Paramadina,
- Roy, Oliever, 1996, *The Failure of Political Islam*, terjemahan *Gagalnya Islam Politik*, Jakarta: Serambi
- Shimogaki, Kazou, 2004, *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Posmodernisme Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*, terj. Yogyakarta: LkiS.
- Singh, Rajendra, 2010, *Social Movements, Old and New: A Post-Moderniat Critique*, terj. *Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book.
- Strenbrik, Karel A., 1989, "Toward a Pancasila Society: The Indonesian Debate on Secularization, Liberation and Development 1969-1989", dalam *Exchange*, No. 54 December
- Syamsuddin, Din, 1990, "Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde Baru", dalam Din Syamsuddin (ed.), *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Panjimas.
- Wiktorowics, Quintan (ed.), 2004, *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, terjemahan *Gerakan Sosial Islam*, Yogyakarta: Daging Publishing dan Yayasan Wakaf Paramadina, 2012.